



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KELAS 1A



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

 Jalan Pamenang Nomor 60 Kediri 64101

 www.pn-kedirikab.go.id

 (0354) 682056

 mail@pn-kedirikab.go.id

 @pnkabkediri

 081132002999

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASEP KOSWARA, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

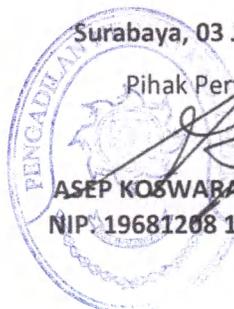
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum.
NIP. 19570723 198303 1 003



Surabaya, 03 Januari 2024

Pihak Pertama,

ASEP KOSWARA, S.H., M.H.
NIP. 19681208 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
		1. Pidana	100%
		2. Perdata	80%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	
		1. Pidana	35%
		2. Perdata	55%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	
		1. Pidana	35%
		2. Perdata	55%
e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	20%		
f. Index persepsi pencari keadilan yang Puas terhadap layanan peradilan.	90%		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	20%
3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	1%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	1%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	40%

5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a.	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajeria	90%
		b.	Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	95%
		c.	Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	95%
		d.	Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	95%
6	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	a.	Nilai LKjIP minimal "BB"	BB
		b.	Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK
		c.	Nilai IPK	90%
		d.	Nilai IKM	90%
		e.	Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A
		f.	Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	90%
		g	Prosentase realisasi anggaran belanja	
		1.	DIPA 01	90%
		2.	DIPA 03	90%
		h	Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%
		i	Prosentase nilai Kinerja Anggaran	
		1.	DIPA 01	90%
		2.	DIPA 03	90%
		j.	Prosentase kedisiplin masuk kerja	95%
k	Pelanggaran disiplin	0%		
7	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima	a.	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	1
		b.	Jumlah kapasitas bandwidth yang memadai	85 Mbps
		c	Prosentase distribusi surat	100%
		d	Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	100%
		e	Prosentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	95%
		f	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	1
		g	Jumlah berita tentang satker yang dimuat dimedia	36
		h	Jumlah layanan pengadilan	24
		i	Jumlah pengguna layanan pengadilan	120
		j	Jumlah layanan bantuan hukum	3
		K	Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	95%

		l	Jumlah pemeliharaan gedung	1
		m	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	8
		n	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	100
		o	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	3
8	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan	a.	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	100%

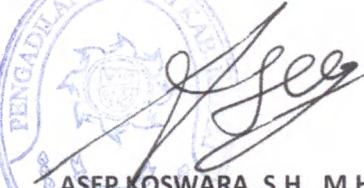
Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas I A Tahun 2024 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen.	Rp. 7.893.636.000,-
6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Interna	Rp. 7.893.636.000,-
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 164.000.000,-
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	Rp. 128.000.000,-
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Rp. 36.000.000,-

Surabaya, 03 Januari 2024

Pihak Kedua,

Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum.
NIP. 19570723 198303 1 003

Pihak Pertama,

ASEP KOSWARA, S.H., M.H.
NIP. 19681208 199403 1 001